

PEMBENTUKAN WADAH SUBAK-GDE DI DAERAH IRIGASI KEDEWATAN KABUPATEN GIANYAR

W. WINDIA DAN K. SUAMBA

Jurusan Sosial Ekonomi, Fakultas Pertanian, Universitas Udayana

ABSTRACT

Basically now, the water available is scarcer. Meanwhile, the population growth that occurs so fast, which is followed by increasing of public prosperity and development of other sectors beyond agricultural sector, causing the increase in water need, both quantitatively and qualitatively. That is why the water need is very competitive among sectors. Generally, in terms of water need for farmers, it is often defeated by the other sectors (especially by the tourism sector). The same situations is felt by *subak* farmers who get water from the Kedewatan Dam, in Sub Regency of Ubud, Regency of Gianyar. Some international hotels in the head of the dam freely take water from the river, and moreover in the end of the dam, rafting activities and the Drinking Water of The Government of Denpasar Company often borrow water from the dam. Therefore, the water available for the subaks is frightened. Based upon such conditions, it is very important to motivate all heads of subaks getting water from the Kedewatan Dam to organize themselves in the institution of subak coordination body (*subak-gde*). Anyhow, that organization is important to strengthen the subak position in their negotiation activities with the outsider. In these community service activities, basically all subak members very much agree to make the higher subak coordination body (*subak-gde*).

Key word: subak, water competition, and higher subak coordination body (subak-gde).

PENDAHULUAN

Pada dasarnya ketersediaan air saat ini sangat terbatas. Sementara itu, karena adanya penambahan penduduk yang cepat, dan adanya perkembangan pendapatan penduduk serta perkembangan di luar sektor pertanian, menyebabkan kebutuhan air menjadi semakin besar, baik secara kuantitatif dan kualitatif. Dengan demikian, persaingan antar sektor dalam penggunaan air semakin kompetitif. (Windia, 2006).

Dalam dekade abad ini PBB mengembangkan program yang disebut Air Untuk Kehidupan (*Water for Life*). Hal ini menunjukkan bahwa air memang telah menjadi sumberdaya yang sangat terbatas, dan selanjutnya memerlukan antisipasi penanganan yang tepat, agar tidak menimbulkan konflik yang bersifat vertikal dan horisontal. Keterbatasan air ditunjukkan dengan adanya kenyataan bahwa saat ini sekitar 1,5 milyar penduduk dunia tidak memiliki akses terhadap air, dan sekitar 2 milyar yang hidup dalam sanitasi yang tidak memadai (Biswas, 2000).

Kasus di Bali menunjukkan hal yang sepadan. Perkembangan pembangunan sektor non-pertanian menyebabkan sektor pertanian menjadi terdesak. Hak guna air yang sejak dahulu kala menjadi hak petani, saat ini mulai mengalami destorsi. Sementara itu petani tidak memiliki akses untuk mengadakan pembelaan, karena mereka tidak memiliki wadah koordinasi untuk memperjuangkan hak-haknya. Sementara itu lembaga sedahan-agung yang seharusnya eksis untuk membela

kepentingan petani/subak, saat ini kelembagaannya menjadi subordinat dari Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda). Oleh karenanya diperlukan langkah-langkah untuk membentuk wadah koordinasi antar sistem subak yang mendapatkan air irigasi dari satu sumber air (satu bendung). Tujuannya adalah agar wadah ini dapat memperjuangkan hak-hak dan keberatan-keberatan petani dalam mempertahankan eksistensinya. Di Bali, wadah koordinasi seperti itu disebut dengan subak-gde.

Bendung Kedewatan yang berlokasi di kawasan Desa Kedewatan-Kec.Ubud- Kab.Gianyar adalah salah satu bendung yang sangat strategis. Hal ini disebabkan karena bendung ini mengairi sawah-sawah yang terletak pada tiga kabupaten/kota, yakni di Kab. Gianyar, Badung dan Denpasar. Sementara itu, bendung ini berlokasi di kawasan Sungai Ayung, yang merupakan kawasan sungai yang sarat dengan kegiatan komponen pariwisata. Di tebing-tebing kawasan bagian hulu sungai, dibangun hotel-hotel internasional yang sangat mahal, dan pada bagian hilir aliran sungai dikembangkan beberapa aktivitas rafting. Hotel mengambil air dari aliran sungai ayung, dan rafting sangat memerlukan air yang cukup agar kegiatan rafting dapat berjalan dengan optimal. Belum lagi kebutuhan air untuk bahan baku PDAM Denpasar.

Persoalan ini sangat mengganggu kepentingan petani. Hal inilah yang mendorong perlunya pembentukan subak-gde yang mengkoordinasikan subak-subak yang mendapatkan air dari Bendung Kedewatan. Pengalaman

di Bali menunjukkan bahwa pada umumnya subak-gde hanya bisa dibentuk kalau ada intervensi/rangsangan/bantuan dari pihak luar (Sutawan dkk, 1989 dan Sutawan dkk. 1991).

Berdasarkan latar belakang masalah seperti yang telah diuraikan sebelumnya, maka tujuan pokok pengabdian pada masyarakat ini ialah merangsang adanya kesepakatan di kalangan semua pekaseh yang areal subaknya mendapatkan air irigasi dari Dam Kedewatan untuk segera membentuk subak-gde. Subak-gde tersebut tidak saja mengkoordinasikan pelaksanaan upacara agama, namun juga mampu memperjuangkan dan melaksanakan hak dan kewajiban subak-gde yang bersangkutan, demi kesejahteraan petani di kawasan tersebut.

Manfaat pengabdian pada masyarakat ini adalah untuk membangun kesadaran semua pakaseh yang mendapatkan air irigasi dari Dam Kedewatan bahwa di masa depan akan terjadi persaingan yang semakin ketat dalam memanfaatkan sumberdaya air. Bahwa untuk tetap dapat mempertahankan dan memperjuangkan hak guna air yang selama ini sudah didapatkan petani, maka sangat perlu dibangun sebuah wadah koordinasi antar subak yang mendapatkan air irigasi dari Dam Kedewatan, dalam bentuk wadah subak-gde.

METODE PEMECAHAN MASALAH

Adapun metode pendekatan yang dilakukan dalam proses pengabdian pada masyarakat ini adalah metode kaji-tindak, dengan teknik Pemahaman Cepat Kondisi Pedesaan (PCKP) dan juga dengan teknik wawancara mendalam pada beberapa responden (pekaseh) yang dianggap relevan. Pada awalnya, melakukan kajian terhadap data dan fakta yang dikumpulkan berkait dengan keberadaan semua subak yang mendapatkan air dari Dam Kedewatan. Selanjutnya, dilakukan tindakan, yakni mengadakan pertemuan dengan semua pekaseh dan semua stakeholders yang terkait, untuk mencari kesepakatan bersama, dalam rangka mencapai tujuan pengabdian pada masyarakat tersebut.

Dalam proses persiapan pelaksanaan pengabdian pada masyarakat dilakukan berbagai hal sebagai berikut.

1. Menghubungi Dinas PU Prop. Bali, untuk mendapatkan data, dan fakta tentang spesifikasi Dam Kedewatan. Adapun spesifikasi dari Dam Kedewatan adalah sebagai berikut.
 - a. Nomer Kode Daerah Irigasi (DI) : 5101000000.
 - b. Nama DI: DI Kedewatan.
 - c. Status Pengelolaan : PU.
 - d. Sumber Air: Sungai Ayung.
 - e. Lokasi Bendung: Desa Kedewatan-Kec. Ubud-Gianyar.
 - f. Dibangun tahun 1927 dan direhabilitasi tahun 1971.
 - g. Panjang Bendung : 28 m.

- h. Panjang Saluran Utama: 39,5 km.
(Terdiri dari: Pasangan, 1,8 km; Tanah, 36,6 km; Trowongan, 1,7 km).
- i. Luas areal yang diairi: 2562, 23 ha.
- j. Jumlah petani : 5938 orang.
- k. Subak yang mendapat air dari Bendung Kedewatan: 45 buah di Kab. Gianyar, 12 buah di Kab. Badung, dan 6 buah di Kota Denpasar.

2. Meninjau (*walkthrough*)

Dalam kegiatan ini tujuannya adalah untuk melihat langsung fisik bendung, jaringan utama, dan bangunan-bagi (untuk melihat kondisi fisik secara riil di lapangan, agar kondisi sistem irigasi dapat dibayangkan secara nyata). Dalam kegiatan ini telah didapatkan informasi bahwa pada dasarnya kondisi fisik bendung dan jaringan irigasi yang lainnya pada umumnya masih baik. Selama ini sudah ada berbagai kegiatan subak untuk memperbaiki jaringan irigasinya yang rusak, dengan berbagai bantuan yang didapatkan dari pemerintah, ataupun dengan usaha swadaya petani yang bersangkutan.

Dalam peninjauan diperoleh pula informasi bahwa hotel dan vila yang berlokasi di hulu Dam Kedewatan banyak yang menyedot air secara langsung dari sungai, yang mengakibatkan air sungai mengecil, dan praktis mempengaruhi ketersediaan air bagi petani. Selanjutnya, di hilir Dam Kedewatan terdapat kegiatan rafting yang memerlukan air yang cukup besar agar kegiatan rafting dapat berjalan dengan optimal. Dalam kaitan ini, sering pengusaha rafting harus mengorbankan kepentingan petani.

3. Membuat pedoman wawancara (untuk dapat mengetahui kondisi subak-subak sampel, dan mempertanyakan kesepakatannya untuk membentuk wadah subak-gde).
4. Mengadakan wawancara mendalam dengan pimpinan subak yang relevan, yang dipilih secara *purposive*, yakni subak yang ada di kawasan hulu, tengah, dan hilir (untuk mendapatkan data dan fakta yang akurat). Dalam wawancara yang dilakukan secara parsial ini, pada umumnya terdapat kesepakatan bahwa mereka tidak keberatan untuk membentuk subak-gde, yang tidak saja mengkoordinasikan pelaksanaan upacara agama, tetapi juga bidang-bidang yang lainnya. Hal-hal lain yang pada umumnya dapat direkam adalah sebagai berikut.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Secara umum hasil kegiatan pada masyarakat dalam rangka membangun kesepakatan pembentukan wadah koordinasi antar sistem subak yang mendapat air irigasi dari Bendung Kedewatan seperti disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1. Pernyataan responden warga subak bendung Kedewatan, Gianyar

| No | Kisaran persentase sampel (%) | Pernyataan responden |
|----|-------------------------------|---|
| 1. | 100 | Mirasakan air irigasi semakin terbatas. |
| 2. | 20 | Mereka tak dapat bertanam secara bersamaan, karena airnya kecil. Mereka mengatur air yang terbatas melalui pergiliran pertanaman. |
| 3. | 60 | Mereka melakukan proses saling pinjam meminjam air irigasi, dalam kegiatan pertanamannya. |
| 4. | 30 | Telah pernah terjadi friksi/konflik antar petani karena masalah yang berkait dengan air irigasi (pencurian air irigasi). |

Selain yang disajikan pada Tabel 1, hasil pengamatan di lapangan juga menemukan hal-hal sebagai berikut:

1. Ada keluhan, karena di sebelah hulu bendung ada pengambilan air sungai yang dilakukan oleh hotel-hotel internasional untuk mengisins kolam renang, penyiraman kebun, dll. Sementara di bagian hilir bendung ada kegiatan rafting yang memerlukan ketersediaan air sungai yang cukup. Kalau air tidak cukup, maka air untuk petani harus ditutup.
2. Embrio subak-gde (wadah koordinasi) pada dasarnya sudah ada. Namun saat ini hanya pada umumnya untuk mengkoordinasikan pelaksanaan upacara (setiap enam bulan sekali) di Pura Subak/Pura Bendung, yang disebut sebagai Pura Laban. Pura Laban berlokasi di sekitar Bangunan Bagi I, di Desa Singakerta.
3. Pelaksanaan upacara odalan di Pura Laban, dilaksanakan sekali oleh subak-subak yang ada di Kota Denpasar, dua kali oleh subak-subak yang ada di Kab.Badung, dan dua kali dilakukan oleh subak-subak di Kab.Gianyar. Kewajiban ini dilakukan secara proporsional berdasarkan jumlah subak/luas sawah yang ada di kawasan kabupaten/kota yang bersangkutan.
4. Untuk melakukan koordinasi subak-subak yang ada di kawasan Kab. Badung, tugasnya saat ini adalah: Ketut Ngenteg/Subak Umabun (Ketua), Wayan Rinta/Subak Umase (Sekretaris), dan Wayan Badra/Subak Pedahanan (Bendahara).
5. Untuk melakukan koordinasi subak-subak yang ada di kawasan Kab. Gianyar, tugasnya saat ini adalah: Gusti Ngurah Sukarsa/Subak Bija (Ketua), Nyoman Neka/Subak Seh-Batubulan (Sekretaris), dan Nyoman Slonogan/Subak Pasekan-Singapadu (Bendahara).
6. Untuk melakukan koordinasi subak-subak yang ada di kawasan Kota Denpasar, tugasnya saat ini adalah: Wayan Kerta/Subak Temaga-Tembau (Ketua), Wayan Suparta/Subak Anggabaya (Sekretaris), dan Wayan Widia/Subak Lungatad (Bendahara).
7. Untuk mengkoordinasikan para koordinator pada setiap kabupaten/kota, saat ini sudah dibentuk pimpinannya yakni: I Gusti Agung Ngurah Koto/

Subak Sedang (Ketua), Wayan Sumadi/Subak Selasih (Sekretaris), dan Nyoman Gumpul/Subak Uma Lambing-Br. Lateng, Sibang Kaja (Bendahara).

Dalam proses pelaksanaan kegiatan pengabdian pada masyarakat, dilakukan pertemuan dengan semua pimpinan subak yang mendapatkan air irigasi dari Bendung Kedewatan. Pelaksanaan pertemuan dilaksanakan di balai wantilan Pura Laba di Kawasan Desa Singakerta, pada Hari Rabu, tgl. 20 September 2006. Pertemuan dihadiri oleh semua pekaseh, karena pada saat itu bertepatan dengan diadakannya piodalan di Pura Laba. Pura Laba adalah pura yang disungsung oleh semua subak yang mendapatkan air irigasi dari Bendung Kedewatan.

Dalam pertemuan tersebut, pada awalnya tim menyampaikan permasalahan yang sebetulnya dihadapi oleh petani berkait dengan semakin terbatasnya ketersediaan air, dan sementara itu, komponen yang membutuhkan semakin banyak, misalnya pihak hotel, PDAM, dan kegiatan rafting (pariwisata). Sementara itu di sungai terdapat berbagai bentuk polusi, misalnya sampah plastik, botol-botol kosong minuman ringan dan minuman keras, dll. Dicurigai bahwa polusi itu berasal dari hotel dan vila yang ada di hulu, yang dengan semena-mena membuang sampahnya ke sungai, disamping mengambil air sungai untuk kebutuhan mereka. Bila pihak pekaseh tidak melakukan tindakan, yakni mempersatukan dirinya dalam bentuk subak-gde, maka posisi akan semakin lemah dalam memperjuangkan hak-haknya. Sementara itu, pihak non – sektor pertanian akan semakin semena-mena memanfaatkan air di sungai.

Setelah melalui diskusi yang mendalam diantara pekaseh yang hadir, maka akhirnya disepakati untuk membentuk subak-gde secara formal. Sehingga kegiatannya nanti, tidak hanya mengkoordinasikan pelaksanaan upacara agama di Pura Laban Kedewatan. Sementara itu, mereka juga sepakat untuk segera menyelesaikan masalah-masalah intern yang kini muncul, misalnya belum adanya pertanggung-jawaban formal khususnya dalam bidang keuangan, dari pihak pengurus yang selama ini mengkoordinasikan pelaksanaan upacara keagamaan di Pura Laban.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Air sudah dirasakan semakin terbatas, friksi/konflik karena masalah air irigasi sudah mulai muncul, ada pengambilan/pemanfaatan air untuk kegiatan pariwisata, dan petani tidak mendapatkan kompensasi apapun, ada kesepakatan untuk membentuk wadah koordinasi antar sistem subak yang mendapatkan air dari Bendung Kedewatan (subak-gde), embrio wadah koordinasi itu pada dasarnya sudah ada, namun hanya bergerak dalam pelaksanaan upacara dan belum bergerak dalam

bidang-bidang lain (distribusi air irigasi, pengeralahan sumberdaya, pemeliharaan, dan penanganan konflik) untuk meningkatkan kesejahteraan petani anggota.

Saran

Diperlukan kegiatan advokasi pada embrio subak-gde yang kini sudah ada, dalam berhadapan dengan pihak lain yang dirasakan merugikan kepentingan petani/subak. Diperlukan kegiatan lebih lanjut, untuk mendampingi proses pembentuk subak-gde secara formal, diantaranya membantu proses pembentukan awig-awig subak-gde, membantu memfasilitasi pemecahan masalah intern yang kini ada dalam embrio wadah koordinasi yang sudah ada, dan lain lain.

UCAPAN TERIMA KASIH

Diucapkan banyak terima kasih kepada Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat (LPPM) Universitas Udayana yang telah membiayai pelaksanaan pengabdian pada masyarakat ini. Disamping itu,

diucapkan pula terima kasih kepada para pekaseh yang areal subaknya mendapatkan air irigasi dari Dam Kedewatan. Karena bersedia menyisihkan waktu untuk diwawancarai, dan bersedia hadir dalam acara pertemuan yang telah diadakan di Wantilan Subak Laban di Desa Kedewatan, Kec. Ubud, Kab.Gianyar.

DAFTAR PUSTAKA

- Biaswas, A.K. 2000. Water Crisis, dalam *Jurnal D+C* tahun 2000, Jerman.
- Sutawan, N; M.Swara; W.Windia; W.Sudana.1989. *Laporan akhir pembentukan wadah koordinasi sistem irigasi di sepanjang Sungai Yeh Ho di Tabanan*, kerjasama UNUD dan Dinas PU Prop. Bali, Denpasar.
- Sutawan, N; M.Swara; W.Windia; W.Sudana. 1991. *Laporan akhir pembentukan wadah koodinasi sistem irigasi di sepanjang Tukad Buleleng, Buleleng*, kerjasama UNUD dengan Dinas PU Prop. Bali, Denpasar.
- Windia, W. 2006. *Transformasi sistem irigasi subak yang berlandaskan Tri Hita Karana*, Pustaka Bali Post, Denpasar.